

KAMIS, 5 JANUARI 2017

Menakar Posisi Humas dalam Institusi

FGD Perhumas Semarang

SEMARANG - Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Semarang dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar *focus group discussion (FGD)* di ruang Sidang Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tajuk yang diusung dalam acara ini adalah "Perluakah Humas?" ini banyak membahas tentang takaran posisi Humas di dalam institusi.

Ketua BPC Perhumas Semarang, Yanuar Luqman mengata-

kan Humas adalah bidang yang strategis dan memiliki peran komunikasi penting dalam mendukung kemajuan organisasi.

Humas modern tidak hanya menjalankan peran tradisional seperti protokoler dan pembawa acara.

Tetapi juga melakukan peran sebagai teknisi komunikasi, fasilitator komunikasi, *problem solving facilitator, expert precribers*. "Faktanya banyak Humas yang hanya dominan melakukan peran teknis,"

terang Yanuar.

Ketua IJTI, Teguh Hadi Prayitno menjelaskan Humas harus menunjukkan eksistensi dan peran kuatnya melalui keahlian dan kecakapan komunikasi. Keberadaan Humas harus mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga pimpinan akan menilai Humas sangat penting."

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Un-

dip) Agus Naryoso mengungkapkan Humas harus berada dalam departemen tersendiri yang memiliki kekuatan penuh untuk bisa mengakses langsung pimpinan tertinggi. Sehingga informasi dan ekspektasi publik langsung bisa disampaikan ke pimpinan.

"Siapa pun yang pemimpin Humas harus memahami praktik Humas secara profesional. Yaitu dilakukan dengan menekankan pada aktivitas komunikasi dua arah.

Kemudian menyerap dan melakukan identifikasi kebutuhan publik, baru dirancang program yang terukur.

Memiliki pengalaman mengelola kegiatan kehumasan. Lebih baik berasal dari latar belakang pendidikan yang relevan," ucap Agus.

Salah satu peserta diskusi, Gita Aprinta membahas tentang Humas pemerintah.

Menurutnya, Humas pemerintah harus memenuhi asas pemerintahan yang baik. Transparansi menjadi tolok ukur kinerja yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. "Harus bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan berimbas pada masyarakat," papar Gita. (akv-72)



SM/dok

PERTEMUAN : Perhumas Semarang dan IJTI saat berkumpul dalam FGD dengan tajuk "Perluakah Humas?" di ruang Sidang Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. (72)